



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 24 Juni 2020
Waktu	:	13.00 WIB – 14.38 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN
Acara	:	Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi BBM dan gas.
Ketua Rapat	:	Marwan Cik Asan
Sekretaris Rapat	:	Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Hadir Anggota	:	ANGGOTA BAKN DPR Republik Indonesia F-P. DEMOKRAT (MARWAN CIK ASAN) F-PKS (AHMAD SYAIKHU) F-PAN (AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E) F-P. GOLKAR (H.M MISBAKHUN, SE., M.H) F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E)

JALANNYA RAPAT:
KETUA RAPAT/F-D (MARWAN CIK ASAN):

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang karena limpahan nikmat dan karunianya kita hari ini *alhamdulillah* dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di ruang rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa menurut peraturan tata tertib No. 1 tahun 2020 Pasal 254 ayat 4 menyatakan bahwa semua jenis rapat yang dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu yaitu keadaan bahaya, kegentingan memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian berdasarkan data dari Sekretariat BAKN bahwa pada saat ini sudah hadir bersama kita Pimpinan dan anggota BAKN 4 orang dari total 9 orang. Baru 4 ya? Berarti kita ini belum kuorum dong? Oh RDPU tidak perlu kuorum ya. Dan sesuai dengan ketentuan karena RDPU ini tidak diperlukan kuorum rapat maka dengan ini rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.10 WIB)

Pimpinan dan anggota BAKN yang terhormat.
Saudara Ketua dan Pimpinan Hiswana Migas yang saya hormati.

Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ketua dan juga para Pimpinan lain sudah berkenan hadir untuk bersama-sama kami semua untuk melaksanakan tugas konstitusi DPR RI khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang mana tugasnya tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2018 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dimana salah satu tugas dari BAKN adalah untuk melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR.

Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan yang hadir pada siang hari ini. Saya Marwan Cik Asan, Ketua BAKN dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Lampung II. Kemudian di sebelah kiri saya Ahmad Syaikh Wakil Ketua dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Kemudian yang hadir Pak Najib Qodratullah anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Jawa Barat II. Dan Pak Muhammad Misbakhun anggota dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Timur II. Lima orang lainnya akan menyusul secara fisik virtual.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Kami sudah mengirimkan TOR kepada Hiswana Migas baik berupa pertanyaan maupun paparan. Untuk mempersingkat waktu karena ini lagi masa Corona ini enggak boleh lama-lama Pak rapatnya, maka kami persilakan kepada Ketua Hiswana Migas untuk memberikan penjelasan terkait topik kita hari ini adalah

mengenai telaah BAKN Akuntabilitas Keuangan Negara terhadap subsidi energi, baik itu energi Migas, maupun listrik kalau tidak salah. Saya persilakan Pak.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Marwan selaku Pimpinan BAKN dan Pak Syaikh, juga Pak Najib dan Pak Wisnu, Misbakhun.

Maaf Pak.

Jadi kami dari Hiswana Migas pertama-tama kami terima kasih atas undangan untuk hadir pada rapat pada siang hari ini. Sedikit kami akan sampaikan Hiswana Migas itu organisasi seperti apa. Jadi di Pertamina khususnya di Direktorat Hilirnya Pak, itu mempunyai beberapa mitra kerja. Nah mitra kerja ini menjadi anggota dari pada Hiswana Migas. Ada pun bidang usaha-bidang usaha di keanggotaan kami itu yang terkait dengan subsidi itu ada di SPBU dan agen LPG PSO, atau agen LPG 3kg.

Kemudian dari sisi struktur organisasi kita di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang skalanya nasional. Kemudian di bawahnya ada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang luas wilayahnya mencakup sama dengan Pertamina MOR (Marketing Operational Region). Jadi ada 8 DPD dan di bawah DPD ada DPC. DPC ini bisa satu atau beberapa kota, itu ada 65 DPC.

Terkait dengan rapat pada siang hari ini, yang utama adalah SPBU dan agen LPG. Mungkin kita akan sedikit sampaikan untuk SPBU. Jumlah SPBU kami sekitar 7000 Pak, 5700 itu SPBU yang reguler. Kemudian yang 1300 itu SPBU yang mini, yang kecil, baik itu SPBU yang 3T maupun SPBU nelayan. Kemudian kalau di keagenan LPG itu ada sekitar 4000 agen LPG PSO di seluruh Indonesia.

Mengenai efektivitas dari pada penyaluran subsidi ini kami lihat sampai saat ini memang pada prinsipnya sudah cukup bagus Pak, tapi dikarenakan adanya geografis dari pada Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, itu yang membuat kadang-kadang ada pelayanan yang agak kesulitan untuk mendapatkan barang-barang subsidi baik BBM maupun LPG. Akan tetapi, untuk BBM dengan adanya program kemarin SPBU 3T, Terdepan, Terpencil dan Terluar itu cukup membantu untuk mencapai konsumen-konsumen atau masyarakat yang di daerah yang terpencil yang tidak terjangkau oleh SPBU reguler.

Sedangkan untuk LPG 3 kg memang agak sulit dikarenakan untuk pengangkutannya harus menggunakan (suara tidak jelas) sendiri, itu kemudian ada tambahan lagi untuk mobil angkutan khusus untuk mengangkut LPG ke daerah ini memang agak sulit. Jadi di daerah-daerah terpencil masih ada sebagian yang menggunakan minyak tanah. Mungkin itu dari sisi penyalurannya. Kalau efektivitas masih efektif Pak.

Nah yang utama mungkin kendala yang kita hadapi dari sisi efektivitas penyaluran tadi. Kalau dibilang subsidi-subsidi itu tercapai enggak ke sasaran, saat ini memang kita melihat adanya sedikit hambatan atau kendala di kita, itu satu tadi letak geografis. Yang kedua, adanya selisih harga antara yang disubsidi dan yang tidak disubsidi. Nah ini yang bisa membuat pihak-pihak tertentu untuk

menyalahgunakan barang-barang subsidi tersebut. Mungkin itu Pak sekedar awal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Rachmad Muhammadiyah. Tapi Bapak NU katanya?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Yang *ngasih* nama Bapak saya.

KETUA RAPAT:

Iya saya pikir penjelasannya cukup ringkas ya dan memang kita kan akan lebih banyak menggali dari diskusi yang terkait dengan efektivitas subsidi ini diterima oleh rakyat. Ini yang paling penting yang harus kita diskusikan pada siang hari ini. *Monggo* silakan mungkin dari meja Pimpinan dulu? Anggota dulu? Pak Najib dulu, silakan.

F-PAN (AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE.):

Baik terima kasih.

Pimpinan BAKN yang saya hormati, serta Anggota dan Seluruh jajaran dari Hiswana Migas yang hadir pada kesempatan hari ini.

Sebagai pembuka pertanyaan saja perlu barang kali nanti bisa saling melengkapi. Kita kalau mendengarkan paparan singkat tadi, cukup jelas dan sepertinya seperti biasa, begitu. Alasan atau dokumentasi yang disampaikan bahwa mulai dari pendistribusian, kendala-kendala termasuk jalur logistik yang tersedia. Ada hal yang ingin saya sampaikan dimana bahwa negeri ini sudah merdeka puluhan tahun dan selalu menghadapi permasalahan yang sama selama puluhan tahun.

Kita sering dengar bahwa menjelang hari besar hari raya, kelangkaan stok jelas yang juga berimplikasi kepada harga. Itu sesuatu yang terjadi, biasa yang masyarakat harus hadapi dari tahun ke tahun. Memang dalam 2, satu tahun terakhir ini kalau di Dapil saya di Jawa Barat II di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sudah relatif tidak begitu nampak hal itu, artinya dari sisi ketersediaan sedikit ada perbaikan dalam berapa tahun terakhir. Tapi kalau kita bicara dengan daerah-daerah tertentu yang mungkin dari sisi akses transportasi logistik dan seterusnya itu masih terkendala, otomatis juga akan memunculkan kendala tersendiri bagi penyaluran dan ketersediaan dari BBM dan gas ini.

Pertanyaannya, sejauh ini dengan berbagai permasalahan tadi yang muncul terutama di beberapa daerah yang masih merasakan betul dampaknya, ini Hiswana ini seperti apa? Kan tidak mungkin Pak. Saya bilang negeri ini merdeka sudah puluhan tahun menghadapi hal yang sama yang kemudian dampaknya itu implikasinya itu ke mana-mana Pak. Dari harga gas yang, atau BBM yang tidak terjamin dari harga misalnya karena *supply* nya rendah. Itu dampaknya kan ke mana-mana secara ekonomi. Harga barang-barang menjadi naik dan seterusnya.

Nah maksud saya, tolong berikan kepada kami juga jangan selalu alasannya itu Pak. Hal yang sama selalu disampaikan. Kreativitas dan inovasi yang Hiswana tunjukkan ini harus lebih dari apa yang sudah didapat hari ini. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Rata-rata sih kalau saya lihat Pak, di kelangkaannya, stoknya. Kalau hal-hal lain rasanya sudah tidak terlalu terkendala. Dan terakhir, masyarakat walaupun tidak di ranah Bapak, dengan harga Pak terutama BBM kok katanya kalau di berita-berita di luar negeri dan sebagainya harganya sudah pada turun, di kita belum. Itu juga belum ranah Bapak ya.

Kira-kira Bapak yang tahu persis di jalur perniagaan seperti apa? Apakah bisa koreksi harga atau tidak? Dan terakhir, karena kita dalam suasana menghadapi Covid-19 ini di Hiswana sendiri seperti apa? Apakah permintaan tinggi dalam situasi begini apa tidak? Karena tinggi rendahnya permintaan juga akan menjadi tolak kita, pertumbuhan ekonomi ke depan, perkembangannya seperti apa? Itu perlu kami ketahui.

Jadi garis besarnya, tolong alasan-alasan yang sudah menjadi sesuatu yang dahsyat ini tidak perlu muncul lagi Pak. Bapak harus punya inovasi, punya kreativitas sehingga daerah-daerah lain yang selama ini masih menghadapi masalah-masalah yang sama itu bisa diselesaikan. Dan ke depannya rencananya akan seperti apa. Itu saja Bapak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Najib. Silakan Pak Misbakhun. Selamat datang Pak Bambang.

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati.

**Ketua BAKN, Wakil Ketua BAKN yang saya hormati,
Anggota BAKN yang saya hormati,
Tam undangan kita hari ini yaitu Hiswana Migas yang saya hormati.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pokok pembahasan kita saat ini sebenarnya salah satu yang sangat fundamental Pak di dalam cara kita mewujudkan salah satu cita-cita negara yaitu *well* (suara tidak jelas). Di antara upaya-upaya mewujudkan *well* (suara tidak jelas) di dalam nya adalah (suara tidak jelas) bagaimana rakyat itu menjadi sejahtera. Salah satu cara kita menyejahterakan rakyat itu adalah bagaimana kemudian apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terpenuhi dan bisa disediakan oleh negara semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Dengan makin berkembangnya ekonomi, makin modernnya kita mengelola perekonomian, apa yang harus disediakan oleh negara itu kan mempunyai harga dan membutuhkan pengorbanan. Karena contoh, minyak juga tidak bisa langsung kita gali, tapi kemudian melalui proses eksplorasi, eksploitasi dan sebagainya. Kemudian juga dengan sumber mineral yang lain, termasuk di dalamnya ada emas,

kemudian ada besi dan sebagainya. Biasanya yang mengikuti perkembangan gas dan sebagainya.

Nah minyak yang selama ini kebutuhan kita menjadi motor penggerak hasil industri dan sebagainya, kemudian di dalamnya juga ada gas, ternyata ketika dikelola dan dieksplorasi, dieksploitasi ternyata harganya menjadi mahal. Sementara tidak seimbang dengan apa yang menjadi kemampuan daya beli. Sehingga negara menciptakan mekanisme subsidi.

Nah subsidi ini kan macam-macam Pak. Melekat kepada barang, subsidi yang bersifat terbuka, subsidi yang bersifat tertutup dan sebagainya. Dan saya yakin ini adalah bukan ranah kebijakannya Hiswana tapi kita ingin tahu apa praktik-praktik subsidi ini di lapangannya ini berjalan sesuai dengan tujuan negara dalam upaya untuk menyejahterakan rakyat? Karena apa? Begitu subsidi ini dilakukan, maka ini adalah yang terjadi dalam praktik yang dalam mata rantai bisnis. Coba mata rantai bisnis. Sehingga orang pada tahu terjun yang paling enak bisnis itu adalah bisnis subsidi Pak karena pasti dibayar oleh negara. *Income* nya orang bicara aspek bisnisnya tinggal spek nya terbatas, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Orang akhirnya (suara tidak jelas) rebutan. Kalau rebutan subsidi itu biasanya rebutan area pemasaran. Gemuk atau tidak. Kemudian seberapa banyak biasanya.

Nah praktik yang seperti ini yang ingin saya tahu di Hiswana Migas ini. Karena apa? Begitu subsidi ini dilakukan maka negara juga *mikir nyari* untung. Karena apa? Dibikin lah BUMN yang mengurus subsidi, istilahnya PSO. Dulu subsidi Pak, sekarang makin canggihnya orang dengan alasan berbagai macam, dengan berbagai macam alasan yang tadinya subsidi tiba-tiba berubah menjadi namanya dana kompensasi Pak. Saya enggak tahu lagi nanti akan bergeser menjadi nama apa.

Cuma tempat ini kan adalah tempat bagaimana kita ini kan menjalankan mandat rakyat. Dipilih melalui Pemilu dan kemudian kita mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan yang salah satunya adalah melalui BAKN ini sebagai Alat Kelengkapan DPR menjalankan fungsi bagaimana apa yang menjadi temuannya BPK, temuan Badan Pemeriksa Keuangan itu kemudian bisa kita dalami lebih lanjut. Kemudian dari pendalaman itu, apa yang kita temukan? Apakah ada *policy* yang salah? *Policy* nya. Kemudian pelaksanaannya, atau dimana? Atau kombinasi antara itu. Nah di sinilah kita ingin kemudian melakukan koreksi.

Nah untuk menggali lebih dalam, karena Hiswana ini kan sifatnya BBM dan LPG Pak ya dan dua (suara tidak jelas) ini yang paling besar Pak (suara tidak jelas). BBM itu di luar nanti ada subsidi pupuk, ada subsidi listrik dan sebagainya. Transportasi juga ada. Tapi BBM ini yang selama ini paling besar, paling besar dan dalam sejarahnya republik ini Pak, iya BBM ini yang selalu menjadi. Dan banyak pertarungan peradaban, peperangan dan sebagainya itu disebabkan oleh yang namanya minyak, begitu. Kalau sebagai orang, kalau kita mengenal adanya emas, ini adalah emas hitam Pak, *the liquid* (suara tidak jelas) katakanlah.

Saya ingin menyampaikannya begini Pak, Pertamina sebagai operatornya negara yang memegang konsesi atas nama negara ini kan dia kemudian menjalankan PSO-PSO ini Pak (Public Service Obligation) PSO ini Pak, mulai dari distribusi dan distribusi itu kan kemudian di sub-kan kepada orang. Tetapi pemegang monopoli subsidiya itu negara, operatornya adalah Pertamina dan dibayar oleh uangnya Bapak-bapak semua, termasuk uang kita. Kita ini dibayar oleh negara, diambil pajaknya oleh negara, *dibalikin* lagi untuk urusannya yang seperti itu.

Nah saya ingin menanyakan soal selama ini menurut Bapak cara Pertamina mengelola sebagai operator yang menjalankan mandat negara dalam menyubsidi

BBM dan LPG menurut Bapak seperti apa dalam praktiknya? Karena Hiswana ini kan iya saya sebenarnya sebagai asosiasi yang sebenarnya, kan yang selama ini pasti punya suka duka berbisnis dengan Pertamina, tentunya Bapak dapat nikmatnya, tetapi kan kalau bisnis sama Pertamina itu kan untung enggak bisa tinggi, iya kan? Kalau rugi perlu digeser sama Pertamina di tempat Bapak-bapak. Nah kita *kepingin* tahu itu Pak, *kepingin* tahu seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, cara Pertamina memperlakukan anggota Hiswana ini seperti apa? Apakah cukup adil bagi Bapak-bapak? Cukup adil? Karena bagaimanapun juga Bapak-bapak ini kan sebagai sub ordinatnya Pertamina harus menjalankan apa yang menjadi diinginnya Pertamina dan bisa terlaksanakan. Contoh, sebaran BBM tentu Bapak diantaranya kan adalah angkutan yang layak, terus bikin *storage* segala kalau menurut saya. Enggak Pak? Belum. Tapi kalau angkutan, terus apa lagi Pak kalau boleh tahu selain angkutan? Izin interaktif ya Pak Ketua.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

(suara tidak menggunakan mic)

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Angkutan darat, laut udara Pak? Ke seluruh Indonesia Pak?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Kalau yang antar depo itu Pertamina sendiri.

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Antar depo Pertamina. Kalau Bapak dari depo ke retailnya?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

(suara tidak menggunakan mic)

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Oke, iya begitu.

Nah yang *kepingin* tahu Pak dari proses bisnis ini, menjalankan kegiatan melayani Pertamina dalam menjalankan tugas *mandatory* utama mereka untuk ini, apa sih suka duka Bapak? Di situ saya *kepingin* tahu dengan pengalaman yang begitu banyak, apakah Bapak punya skema yang membuat BBM, membuat subsidi itu menjadi efisien? Kalau Pertamina enak Pak, berapa pun *cost* yang dia keluarkan pasti akan ditanggung oleh negara, pasti. Jadi bisnis yang paling gampang itu bisnis subsidi Pak. Bagaimana Pak? Karena negara tidak mau mengambil risiko pertama. Rakyat kekurangan dan ini rakyat yang kekurangan ini kan implikasinya politik. Makanya kekuasaan itu akan selalu berusaha mencari uang sebisa mungkin untuk bisa menutupi ini.

Nah kenapa Pak kemudian subsidi ini menjadi bagian yang paling material? Kalau biasanya orang mengaudit Pak itu ada *size materialis*. Seberapa material dan